

**PEMERINTAH KABUPATEN
TEMANGGUNG
DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN
PERMUKIMAN DAN LINGKUNGAN HIDUP
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**



**UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR
SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2022**

DAFTAR ISI

BAB I	
PENDAHULUAN	2
Maksud dan Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan SKPD	2
Landasan Hukum Penyusunan Laporan Keuangan SKPD	3
Sistematika Penulisan Catatan atas Laporan Keuangan SKPD	5
BAB II	
IKHTISAR PENCAPAIAN KINERJA KEUANGAN SKPD	6
Ikhtisar Realisasi Pencapaian Target Kinerja Keuangan SKPD	6
Hambatan dan Kendala yang Ada dalam Pencapaian Target yang Telah Ditetapkan	13
BAB III	
PENJELASAN POS-POS LAPORAN KEUANGAN SKPD	15
Rincian dari Penjelasan dari Masing-Masing Pos-Pos Pelaporan Keuangan SKPD	15
Pendapatan - LRA	15
Belanja	116
Beban	24
Aset	28
Kewajiban	39
Ekuitas Dana	42
Pengungkapan atas Pos-Pos yang timbul sehubungan dengan Penerapan Basis Akrual atas Pendapatan, Belanja dan Rekonsiliasinya dengan Penerapan Basis Kas, untuk Entitas Akuntansi/Entitas Pelaporan yang Menggunakan Basis Akrual pada SKPD	43
BAB IV	
PENJELASAN ATAS INFORMASI-INFORMASI NON KEUANGAN SKPD	45
BAB V	
PENUTUP	49

BAB I PENDAHULUAN

Entitas akuntansi merupakan unit pemerintahan yang mengelola anggaran, kekayaan, dan kewajiban yang menyelenggarakan akuntansi dan menyajikan Laporan Keuangan di Pemerintah Kabupaten Temanggung yang dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 24 Tahun 2020 Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Temanggung, Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup sebagai entitas akuntansi wajib menyajikan Laporan Keuangan yang terdiri dari:

1. Laporan Realisasi Anggaran (LRA);
2. Neraca;
3. Laporan Operasional (LO);
4. Laporan Perubahan Ekuitas (LPE); dan
5. Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK)

1.1 Maksud dan Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan SKPD

Catatan atas Laporan Keuangan dimaksudkan agar laporan keuangan dapat dipahami oleh pembaca secara luas, tidak terbatas hanya untuk pembaca tertentu maupun manajemen entitas pelaporan, karena Laporan Keuangan dapat dimungkinkan mengandung informasi yang mempunyai potensi kesalahpahaman diantara pembacanya. Untuk menghindari kesalahpahaman tersebut, dalam menyajikan Laporan Keuangan harus dibuat Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) yang berisi informasi dengan tujuan untuk memudahkan pengguna dalam memahami Laporan Keuangan.

Adapun manfaat bagi pemerintah adalah memberikan informasi yang lebih transparan mengenai biaya pemerintah dan meningkatkan kualitas pengambilan keputusan dengan menggunakan informasi yang lebih komprehensif, tidak sekedar informasi yang berbasis kas. Sedangkan manfaat bagi masyarakat pengguna antara lain memungkinkan pengguna laporan untuk menilai akuntabilitas

pengelola seluruh sumber daya oleh suatu entitas, menilai kinerja dan posisi keuangan suatu entitas sehingga dapat menjadi dasar bagi pengambilan keputusan mengenai penyediaan dan pemanfaatan sumber daya yang lebih tepat.

Catatan atas Laporan Keuangan meliputi penjelasan atau daftar terinci atau analisis atas nilai suatu pos yang disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran (LRA), Neraca, Laporan Operasional (LO), dan Laporan Perubahan Ekuitas (LPE).

1.2 Landasan Hukum Penyusunan Laporan Keuangan SKPD

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik

- Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 9. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 17 Tahun 2009 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2009 Nomor 17);
 10. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 23 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2020 Nomor 23)
 11. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 11 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2021 Nomor 11);
 12. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 9 Tahun 2022 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2022 Nomor 9);
 13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah;
 14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodifikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
 15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
 16. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodifikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.

1.3 Sistematika Penulisan Catatan atas Laporan Keuangan SKPD

Penyusunan Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) Kabupaten Temanggung Tahun Anggaran 2022, secara sistematis terdiri dari:

- BAB I : PENDAHULUAN
- BAB II : IKHTISAR PENCAPAIAN KINERJA KEUANGAN SKPD
- BAB III : PENJELASAN POS-POS LAPORAN KEUANGAN SKPD
- BAB IV : PENJELASAN ATAS INFORMASI-INFORMASI NON KEUANGAN SKPD
- BAB V : PENUTUP

BAB II IKHTISAR PENCAPAIAN KINERJA KEUANGAN SKPD

2.1 Ikhtisar Realisasi Pencapaian Target Kinerja Keuangan SKPD

Realisasi pencapaian target kinerja keuangan Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup Kabupaten Temanggung selama tahun 2022 dapat dirinci sebagai berikut:

a. Pendapatan

Pendapatan Asli Daerah yang ada di Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup adalah pendapatan dari Retribusi Pelayanan Persampahan/ Kebersihan. Realisasi Anggaran Pendapatan Retribusi Pelayanan Persampahan/ Kebersihan Tahun 2022 Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup Kab. Temanggung adalah sebesar Rp.1.081.363.850,- dari total anggaran sebesar Rp.825.000.000,- atau sekitar 131%. Adapun rincian pendapatan sebagai berikut:

No	URAIAN	ANGGARAN (Rp.)	REALISASI (Rp.)	%
1	2	3	4	5=4/3x100
1	Retribusi Pelayanan Persampahan/ Kebersihan	825.000.000,-	1.081.363.850,-	131 %
	JUMLAH	825.000.000,-	1.081.363.850,-	131%

b. Belanja

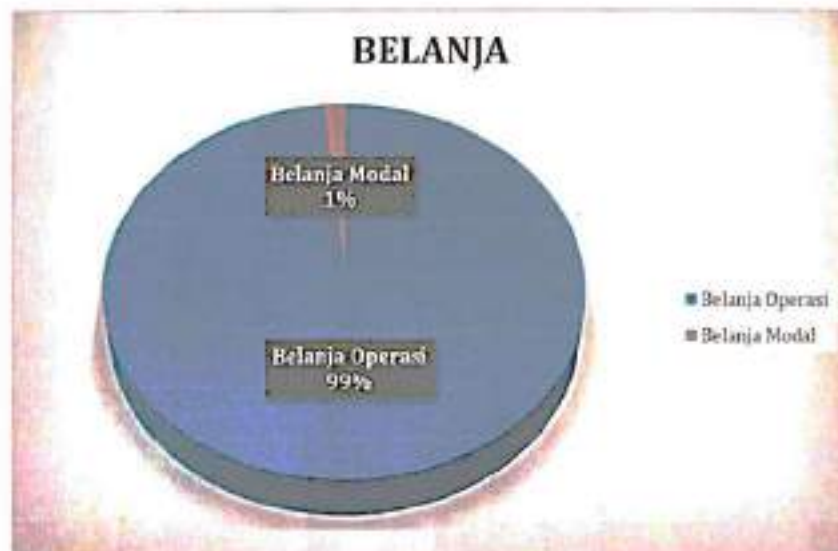
Alokasi dana APBD Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup Kabupaten Temanggung pada

Tahun Anggaran 2022 ini sebesar Rp.30.185.522.234,- yang digunakan untuk membiayai 2 jenis belanja yaitu:

- 1) Belanja Operasi sebesar Rp.29.753.401.553,- yang terdiri dari:
 - Belanja Pegawai sebesar Rp.12.965.457.544,-
 - Belanja Barang dan Jasa sebesar Rp.16.307.944.009,-
 - Belanja Sosial sebesar Rp.480.000.000,-
- 2) Belanja Modal sebesar Rp.432.120.681,- yang terdiri dari:
 - Belanja Modal Peralatan dan Mesin sebesar Rp.188.899.400,-
 - Belanja Modal Gedung dan Bangunan sebesar Rp.197.993.900,-
 - Belanja Modal Jalan, Jaringan dan Irigasi sebesar Rp.45.227.381,-

Adapun Realisasi Belanja Daerah TA 2022 di DPRKPLH adalah sebesar Rp.29.263.067.691,- dengan rincian sebagai berikut: untuk Belanja Operasi sebesar Rp.28.837.009.746,- dan Belanja Modal sebesar Rp.426.057.945,-.

Bagan 3.1
Proporsi Belanja DPRKPLH Kab. Temanggung
Tahun Anggaran 2022



Sumber: Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah DPRKPLH Tahun Anggaran 2022

Belanja Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup Kabupaten Temanggung, terbagi dalam masing-masing Program, Kegiatan dan Sub.Kegiatan sebagaimana Tabel 3.1 dibawah ini:

Tabel 3.1
Ikhtisar Realisasi Pencapaian Target Kinerja Keuangan Tahun Anggaran 2022

SKPD : Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup

Kabupaten : Temanggung

No	PROGRAM	APBD PERUBAHAN TA 2022	REALISASI (Rp)	REALISASI (%)	
	KEGIATAN/ SUB. KEGIATAN			KEUANGAN	FISIK
1	Program Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan Regional	2.532.400.000	2.526.894.468	99,78%	100%
	Kegiatan Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan di Daerah Kabupaten/ Kota	2.532.400.000	2.526.894.468	99,78%	100%
	Sub. Keg. Pembangunan TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS	2.532.400.000	2.526.894.468	99,78%	100%
2	Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah	2.717.885.000	2.716.675.371	99,96%	100%
	Kegiatan Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik Dalam Daerah Kabupaten/ Kota	2.717.885.000	2.716.675.371	99,96%	100%
	Sub. Kegiatan Pembangunan/ Penyediaan Sub Sistem Pengolahan Setempat	900.000.000	900.000.000	100%	100%
	Sub. Kegiatan Pembangunan/ Penyediaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Terpusat Skala Permukiman	1.817.885.000	1.816.675.371	99,93%	100%
3	Program Pengembangan Perumahan	220.427.990	209.041.818	95%	100%
	Kegiatan Pembinaan	220.427.990	209.041.818	95%	100%

	Pengelolaan Rumah Susun Umum dan/atau Rumah Khusus				
	Sub. Kegiatan Penatausahaan Pemanfaatan Rumah Susun Umum dan/atau Rumah Khusus	220.427.990	209.041.818	95%	100%
4	Program Kawasan Pemukiman Serta Pemukiman Kumuh	2.233.544.000	2.215.404.347	99,19%	100%
	Kegiatan Peningkatan Kualitas Kawasan Pemukiman Kumuh dengan Luas Dibawah 10 HA	2.233.544.000	2.215.404.347	99,19%	100%
	Sub. Kegiatan Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni	515.000.000	499.651.347	97,02%	100%
	Sub. Kegiatan Kerjasama Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni Beserta PSU	27.859.000	25.068.000	90%	100%
	Sub. Kegiatan Pembangunan Rumah Baru Layak Hun	1.690.685.000	1.690.685.000	100%	100%
5	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota	12.954.432.544	12.462.314.530	96,20%	100%
	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	12.954.432.544	12.462.314.530	96,20%	100%
	Sub. Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	12.954.432.544	12.462.314.530	96,20%	100%
6	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota	93.946.100	87.531.750	93,17%	100%
	Sub. Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor	5.998.500	5.979.500	99,68%	100%
	Sub. Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor	20.999.100	20.849.250	99,29%	100%
	Sub. Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	21.950.000	21.653.800	99%	100%
	Sub. Kegiatan Fasilitasi Kunjungan Tamu	14.999.500	11.413.500	75%	100%
	Sub. Kegiatan Penyelenggaraan Rapat	29.999.000	27.635.700	92%	100%

	Koordinasi dan Konsultasi SKPD				
7	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota	590.211.300	556.666.894	94%	100%
	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	590.211.300	556.666.894	94%	100%
	Sub. Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	6.000.000	5.455.000	91%	100%
	Sub. Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, SDA dan Listrik	92.495.000	81.719.185	88%	100%
	Sub. Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	491.715.300	469.492.809	95%	100%
8	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota	337.965.300	329.266.332	97%	100%
	Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	337.965.300	329.266.332	97%	100%
	Sub. Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	82.986.200	76.316.467	92%	100%
	Sub. Kegiatan Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	246.999.000	247.974.865	99%	100%
	Sub. Kegiatan Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	4.979.200	4.975.000	99,92%	100%
9	Program Perencanaan Lingkungan Hidup	35.000.000	34.785.750	99%	100%
	Kegiatan Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Kabupaten/ Kota	35.000.000	34.785.750	99%	100%
	Sub. Kegiatan Pengendalian Pelaksanaan RPPLH Kabupaten/ Kota	35.000.000	34.785.750	99%	100%

10	Program Pengendalian Pencemaran dan/ atau Kerusakan Lingkungan Hidup	157.863.700	152.812.790	97%	100%
	Kegiatan Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan LH Kabupaten/ Kota	157.863.700	152.812.790	97%	100%
	Sub. Kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran LH Dilaksanakan Terhadap Media Tanah, Air, Udara dan Laut	29.999.900	29.596.750	99%	100%
	Sub. Kegiatan Pengelolaan Laboratorium LH Kabupaten/ Kota	127.863.800	123.216.040	96%	100%
11	Program Pengendalian Pencemaran dan/ atau Kerusakan LH	600.238.500	507.357.433	85%	100%
	Kegiatan Pemulihan Pencemaran dan/atau Kerusakan LH Kab/ Kota	600.238.500	507.357.433	85%	100%
	Sub. Kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Rehabilitasi	600.238.500	507.357.433	85%	100%
12	Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (KEHATI)	1.336.700.100	1.288.474.578	96%	100%
	Kegiatan Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kab/ Kota	1.336.700.100	1.288.474.578	96%	100%
	Sub. Kegiatan Pengelolaan Taman Keanekaragaman Hayati Di Luar Kawasan Hutan	90.604.000	64.264.193	71%	100%
	Sub. Kegiatan Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)	1.245.836.100	1.224.210.385	98%	100%
13	Program Pengendalian Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Limbah B3)	10.000.000	8.805.000	88%	100%
	Kegiatan Penyimpanan Sementara Limbah B3	10.000.000	8.805.000	88%	100%
	Sub. Kegiatan Fasilitas Pemenuhan Komitmen Izin Penyimpanan Sementara Limbah B3 Dilaksanakan melalui	10.000.000	8.805.000	88%	100%

	Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik				
14	Program Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan dan Izin Perindungan dan Pengelolaa LH (PPLH)	35.001.300	31.893.000	91%	100%
	Kegiatan Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan dan Izin PPLH Diterbitkan oleh Pemda Kab/ Kota	35.001.300	31.893.000	91%	100%
	Sub. Kegiatan Pengawasan Usaha dan/ atau Kegiatan yang Izin Lingkungan Hidup, Izin PPLH yang Diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota	35.001.300	31.893.000	91%	100%
15	Program Penghargaan Lingkungan Hidup untuk Masyarakat	93.580.000	93.176.300	99,57%	100%
	Kegiatan Pemberian Penghargaan Lingkungan Hidup Tingkat Daerah Kab/ Kota	93.580.000	93.176.300	99,57%	100%
	Sub. Kegiatan Penilaian Kinerja Masyarakat/ Lembaga Masyarakat/ Dunia Usaha/ Dunia Pendidikan/ Filantropi dalam Perlindungan dan Pengelolaan LH	93.580.000	93.176.300	99,57%	100%
16	Program Pengelolaan Persampahan	6.236.326.400	6.041.927.230	97%	100%
	Kegiatan Pengelolaan Sampah	6.236.326.400	6.041.927.230	97%	100%
	Sub. Kegiatan Penanganan Sampah dengan Melakukan Pemilahan, Pengumpulan, Pengangkutan, Pengolahan dan Pemrosesan Akhir Sampah di TPA/TPST/SPA Kabupaten/ Kota	5.172.792.300	4.996.157.268	97%	100%
	Sub. Kegiatan Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengelolaan Persampahan	663.000.000	665.666.600	97%	100%
	Sub. Kegiatan	380.534.100	380.103.362	99,89%	100%

	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan di TP/TPST/SPA Kab/Kota				
	JUMLAH	30.185.522.234	29.263.067.691	97%	

2.2 Hambatan dan Kendala yang Ada dalam Pencapaian Target yang Telah Ditetapkan

Secara umum dalam pencapaian target realisasi belanja yang dalam setiap pelaksanaan kegiatan di tahun 2022 tidak terlepas dari hambatan ataupun kendala. Adapun hambatan dan kendala yang dihadapi adalah sebagai berikut :

- a. Perencanaan kegiatan dan pengadaan barang dan jasa yang kurang matang;
- b. Regulasi kegiatan yang tidak terbit pada awal tahun;
- c. Masih terbatasnya jumlah dan kapasitas sumber daya manusia (SDM) untuk mendukung pelaksanaan kegiatan (terbatasnya personil yang mempunyai Sertifikat Barang/Jasa dan terbatasnya personil pengelola kegiatan yang memahami prosedur ketentuan serta tahapan pengadaan barang/ jasa);
- d. Sarana dan prasarana untuk mendukung pelaksanaan kegiatan belum sepenuhnya terpenuhi, seperti:
 - belum adanya gudang penyimpanan barang habis pakai (ATK, Cetak dsb) dan Barang Milik Daerah;
 - masih kurangnya kendaraan roda 4 (empat) dalam mendukung operasional kegiatan di bidang-bidang maupun Sekretariat;
 - masih kurangnya kendaraan roda 3 (tossa), roda 4 (pick up), roda 6 (truck) dan arm roll maupun alat berat lainnya didalam mendukung operasional kegiatan pertamanan, kebersihan kota, pengelolaan persampahan di TPS, TPS3R dan juga TPA;
 - belum mempunyai garasi permanen untuk armada kebersihan, persampahan dan pertamanan;
 - masih kurangnya komputer dan peralatan kantor pendukung lainnya di bidang-bidang, UPT dan Sekretariat DPRKPLH;

- terdapat beberapa Alat Berat di TPA yang rusak, peralatan perkantoran dan juga kendaraan operasional yang rusak yang membutuhkan biaya pemeliharaan yang tidak sedikit.

BAB III
PENJELASAN POS-POS LAPORAN KEUANGAN SKPD

3.1. Rincian penjelasan dari masing - masing pos - pos Pelaporan Keuangan SKPD

3.1.1. Pendapatan - LRA

Realisasi pendapatan selama tahun 2022 merupakan hak pendapatan Tahun Anggaran 2022, sehingga tidak terdapat perbedaan antara realisasi pendapatan di Laporan Operasional dengan di Laporan Realisasi Anggaran. Pendapatan Asli Daerah yang ada di Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup Kab. Temanggung adalah pendapatan berupa Retribusi Pelayanan Persampahan/ Kebersihan.

Realisasi pendapatan tahun 2021 adalah sebagai berikut:

No	Uraian	Anggaran Perubahan TA 2021 (Rp)	Realisasi (Rp)	Sisa Anggaran (Rp)	%	Keterangan
1	2	3	4	5	6	7
1.	Retribusi Pelayanan Persampahan/ Kebersihan	825.000.000	862.976.550	Rp.0,-	105%	Retribusi melampaui target yang ditetapkan yaitu sebesar Rp.37.976.550,-
	Jumlah Total	825.000.000	862.976.550	Rp.0,-	105%	

Realisasi pendapatan tahun 2022 adalah sebagai berikut:

No	Uraian	Anggaran Perubahan TA 2022 (Rp)	Realisasi (Rp)	Sisa Anggaran (Rp)	%	Keterangan
1	2	3	4	5	6	7
1.	Retribusi Pelayanan Persampahan/ Kebersihan	825.000.000	1.081.363.850	Rp.0,-	131%	Retribusi melampaui target yang ditetapkan yaitu sebesar Rp.256.363.850,-
	Jumlah Total	825.000.000	1.081.363.850	Rp.0,-	131%	

Retribusi pelayanan persampahan/ kebersihan melampaui target yang ditetapkan. Hal ini disebabkan :

- Pembayaran retribusi dilaksanakan pada bulan berjalan, tidak dibayarkan pada bulan berikutnya;
- Adanya retribusi dari warga/ kelompok masyarakat/ pemerintahan desa untuk proses pengelolaan sampah langsung ke TPA;
- Penyesuaian tarif Perda Retribusi Tahun 2020 yang mengalami kenaikan sebesar 60%;
- Bertambahnya layanan pengelolaan sampah desa ke TPA yang semula pada tahun 2021 sejumlah 133 desa/kelurahan, bertambah menjadi 174 desa/ kelurahan di tahun 2022.

3.1.2. Belanja

Belanja dilakukan dengan mempertimbangkan prinsip-prinsip penghematan dan efisiensi, namun tetap menjamin terlaksananya kegiatan-kegiatan sebagaimana yang telah ditetapkan dalam DPA Belanja Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup Kabupaten Temanggung.

Realisasi anggaran belanja DPRKPLH Tahun Anggaran 2021 dan 2022 adalah sebagai berikut dibawah ini:

Tahun Anggaran 2021		
	Anggaran Perubahan	Realisasi
Belanja Operasi	Rp.28.104.780.156,-	Rp.26.615.027.086,-
Belanja Modal	Rp.2.232.722.300,-	Rp.2.157.617.175,-
Jumlah	Rp.30.337.502.456,-	Rp.28.772.644.261,-

Tahun Anggaran 2022		
	Anggaran Perubahan	Realisasi
Belanja Operasi	Rp.29.753.401.553,-	Rp.28.837.009.746,-
Belanja Modal	Rp.432.120.681,-	Rp.426.057.945,-
Jumlah	Rp.30.185.522.234,-	Rp.29.263.067.691,-

Realisasi anggaran belanja Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup tanggal 1 Januari 2022 s/d 31 Desember 2022 adalah sebagai berikut :

No	PROGRAM	APBD PERUBAHAN TA 2022	REALISASI		SISA ANGGARAN (Rp)
	KEGIATAN/ SUB. KEGIATAN		(Rp)	%	
1	Program Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan Regional	2.532.400.000	2.526.894.468	99,78%	5.505.532
	Kegiatan Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan di Daerah Kabupaten/ Kota	2.532.400.000	2.526.894.468	99,78%	5.505.532
	Sub. Keg. Pembangunan TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS	2.532.400.000	2.526.894.468	99,78%	5.505.532
2	Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah	2.717.885.000	2.716.675.371	99,96%	1.209.629
	Kegiatan Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik Dalam Daerah Kabupaten/ Kota	2.717.885.000	2.716.675.371	99,96%	1.209.629
	Sub. Kegiatan Pembangunan/ Penyediaan Sub Sistem Pengolahan Setempat	900.000.000	900.000.000	100%	-
	Sub. Kegiatan Pembangunan/ Penyediaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Terpusat Skala Permukiman	1.817.885.000	1.816.675.371	99,93%	1.209.629
3	Program Pengembangan Perumahan	220.427.990	209.041.818	95%	11.386.172
	Kegiatan Pembinaan Pengelolaan Rumah Susun Umum dan/atau Rumah Khusus	220.427.990	209.041.818	95%	11.386.172
	Sub. Kegiatan Penatausahaan Pemanfaatan Rumah Susun Umum dan/atau Rumah Khusus	220.427.990	209.041.818	95%	11.386.172
4	Program Kawasan Permukiman Serta Permukiman Kumuh	2.233.544.000	2.215.404.347	99,19%	18.139.653

	Kegiatan Peningkatan Kualitas Kawasan Pemukiman Kumah dengan Lusa Dibawah 10 HA	2.233.544.000	2.215.404.347	99,19%	18.139.653
	Sub. Kegiatan Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni	515.000.000	499.651.347	97,02%	15.348.653
	Sub. Kegiatan Kerjasama Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni Beserta PSU	27.858.000	25.058.000	90%	2.791.000
	Sub. Kegiatan Pembangunan Rumah Baru Layak Huni	1.690.685.000	1.690.685.000	100%	-
5	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota	12.954.432.544	12.462.314.530	96,20%	492.118.014
	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	12.954.432.544	12.462.314.530	96,20%	492.118.014
	Sub. Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	12.954.432.544	12.462.314.530	96,20%	492.118.014
6	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota	93.946.100	87.531.750	93,17%	6.414.350
	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	93.946.100	87.531.750	93,17%	6.414.350
	Sub. Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor	5.998.500	5.979.500	99,68%	19.000
	Sub. Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor	20.999.100	20.849.250	99,29%	149.850
	Sub. Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	21.950.000	21.653.800	99%	296.200
	Sub. Kegiatan Fasilitas Kunjungan Tamu	14.999.500	11.413.500	76%	3.586.000
	Sub. Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	20.999.000	27.635.700	92%	2.363.300
7	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota	590.211.300	556.668.994	94%	33.544.306
	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	590.211.300	556.668.994	94%	33.544.306

	Sub. Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	6.000.000	5.455.000	91%	545.000
	Sub. Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, SDA dan Listrik	92.496.000	81.719.185	88%	10.776.815
	Sub. Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	491.715.300	469.492.809	95%	22.222.491
8	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota	337.965.300	329.266.332	97%	8.698.968
	Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	337.965.300	329.266.332	97%	8.698.968
	Sub. Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	82.996.200	79.316.457	92%	6.669.733
	Sub. Kegiatan Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	249.999.900	247.974.865	99%	2.025.035
	Sub. Kegiatan Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	4.979.200	4.975.000	99,92%	4.200
9	Program Perencanaan Lingkungan Hidup	35.000.000	34.785.750	99%	214.250
	Kegiatan Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Kabupaten/ Kota	35.000.000	34.785.750	99%	214.250
	Sub. Kegiatan Pengendalian Pelaksanaan RPPLH Kabupaten/ Kota	35.000.000	34.785.750	99%	214.250
10	Program Pengendalian Pencemaran dan/ atau Kerusakan Lingkungan Hidup	157.863.700	152.612.790	97%	5.050.910
	Kegiatan Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan LH Kabupaten/ Kota	157.863.700	152.612.790	97%	5.050.910

	Sub. Kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran LH Dilaksanakan Terhadap Media Tanah, Air, Udara dan Laut	29.999.900	29.596.750	99%	403.150
	Sub. Kegiatan Pengelolaan Laboratorium LH Kabupaten/ Kota	127.863.800	123.216.040	96%	4.647.760
11	Program Pengendalian Pencemaran dan/ atau Kerusakan LH	600.238.500	507.397.433	85%	92.841.067
	Kegiatan Pemulihan Pencemaran dan/atau Kerusakan LH Kab/ Kota	600.238.500	507.397.433	85%	92.841.067
	Sub. Kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Rehabilitasi	600.238.500	507.397.433	85%	92.841.067
12	Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (KEHATI)	1.336.700.100	1.288.474.578	96%	48.225.522
	Kegiatan Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kab/ Kota	1.336.700.100	1.288.474.578	96%	48.225.522
	Sub. Kegiatan Pengelolaan Taman Keanekaragaman Hayati Di Luar Kawasan Hutan	90.864.000	64.284.193	71%	26.599.807
	Sub. Kegiatan Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)	1.245.836.100	1.224.210.385	98%	21.625.715
13	Program Pengendalian Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Limbah B3)	10.000.000	8.805.000	88%	1.195.000
	Kegiatan Penyimpanan Sementara Limbah B3	10.000.000	8.805.000	88%	1.195.000
	Sub. Kegiatan Fasilitas Pemenuhan Komitmen Izin Penyimpanan Sementara Limbah B3 Dilaksanakan melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	10.000.000	8.805.000	88%	1.195.000
14	Program Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan dan Izin Perindungan dan Pengelolaah LH (PPLH)	35.001.300	31.893.000	91%	3.108.300

	Kegiatan Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan dan Izin PPLH Ditebitkan oleh Pemda Kab/ Kota	35.901.300	31.893.000	91%	3.108.300
	Sub. Kegiatan Pengawasan Usaha dan/ atau Kegiatan yang Izin Lingkungan Hidup, Izin PPLH yang Ditebitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota	35.901.300	31.893.000	91%	3.108.300
15	Program Penghargaan Lingkungan Hidup untuk Masyarakat	93.580.000	93.176.300	99,57%	403.700
	Kegiatan Pemberian Penghargaan Lingkungan Hidup Tingkat Daerah Kab/ Kota	93.580.000	93.176.300	99,57%	403.700
	Sub. Kegiatan Penilaian Kinerja Masyarakat/ Lembaga Masyarakat/ Dunia Usaha/ Dunia Pendidikan/ Filantropi dalam Perlindungan dan Pengelolaan LH	93.580.000	93.176.300	99,57%	403.700
16	Program Pengelolaan Pemsampahan	6.236.326.400	6.041.927.230	97%	194.399.170
	Kegiatan Pengelolaan Sampah	6.236.326.400	6.041.927.230	97%	194.399.170
	Sub. Kegiatan Penanganan Sampah dengan Melakukan Pemilahan, Pengumpulan, Pengangkutan, Pengolahan dan Pemrosesan Akhir Sampah di TPA/TPST/SPA Kabupaten/ Kota	5.172.792.300	4.998.157.268	97%	176.635.032
	Sub. Kegiatan Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengelolaan Pemsampahan	683.000.000	665.666.600	97%	17.333.400
	Sub. Kegiatan Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pemsampahan di TPA/TPST/SPA Kab/Kota	380.534.100	380.103.362	99,89%	430.738
	JUMLAH	30.185.522.234	29.263.067.691	97%	922.454.543

Penjelasan belanja yang terdapat di Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup :

1). Belanja Operasi

Belanja Operasi	TA 2021		TA 2022	
	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi
Belanja Pegawai	Rp.12.412.000.253,-	Rp.12.305.704.920,-	Rp.12.965.457.544,-	Rp.12.472.089.530,-
Belanja Barang/Jasa	Rp.13.692.719.903,-	Rp.12.309.322.166,-	Rp.16.307.944.009,-	Rp.15.899.920.216,-
Belanja Hibah	Rp. 2.000.000.000,-	Rp. 2.000.000.000,-	-	-
Belanja Bantuan Sosial	-	-	Rp.480.000.000,-	Rp.465.000.000,-
Jumlah	Rp.28.104.780.156,-	Rp.26.615.027.086,-	Rp.29.753.401.553,-	Rp.28.637.009.746,-

Belanja Operasi adalah pengeluaran anggaran untuk kegiatan sehari-hari Pemerintah Daerah yang memberi manfaat jangka pendek. Belanja Operasi terdiri dari:

a) Belanja Pegawai

Realisasi Belanja Pegawai Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp.12.472.089.530,- atau 96,2% dari anggaran sebesar Rp.12.965.457.544,-

b) Belanja Barang dan Jasa

Realisasi Belanja Barang dan Jasa Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp.15.899.920.216,- atau 97,5% dari anggaran sebesar Rp.16.307.944.009,-

c) Belanja Bantuan Sosial

Realisasi Belanja Bantuan Sosial Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp.465.000.000,- atau 96,9% dari anggaran sebesar Rp. 480.000.000,-

Realisasi Belanja Operasi Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp.28.637.009.746,- atau 96,9% dari anggaran sebesar Rp.29.753.401.553,-

2) Belanja Modal

Belanja Modal merupakan Belanja Pemerintah Daerah yang manfaatnya melebihi 1 tahun anggaran dan akan menambah asset atau kekayaan daerah, dan selanjutnya akan menambah belanja yang bersifat rutin seperti biaya pemeliharaan pada kelompok belanja administrasi umum (Halim, 2004).

Belanja Modal DPRKPLH terdiri dari:

Belanja Modal	TA 2021		TA 2022	
	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	Rp.2.082.722.300,-	Rp.2.058.472.175,-	Rp.188.899.400,-	Rp.183.819.360,-
Belanja Modal Gedung dan Bangunan	Rp. 50.000.000,-	Rp.49.700.000,-	Rp.197.993.900,-	Rp.197.136.585,-
Belanja Modal Jalan, Jaringan dan Irigasi	Rp. 0,-	Rp. 0,-	Rp.45.227.381,-	Rp.45.102.000,-
Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	Rp.100.000.000,-	Rp.49.445.000,-	-	-
Jumlah	Rp.2.232.722.300,-	Rp.2.157.617.175,-	Rp.432.120.681,-	Rp.426.057.945,-

a) Belanja Modal Peralatan dan Mesin

Realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp.183.819.360,- atau 97,3% dari anggaran sebesar Rp.188.899.400,- .

b) Belanja Modal Gedung dan Bangunan

Realisasi Belanja Modal Gedung dan Bangunan Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp.197.136.585,- atau 99,6% dari anggaran sebesar Rp.197.993.900,- .

c) Belanja Modal Jalan, Jaringan dan Irigasi

Realisasi Belanja Modal Jalan, Jaringan dan Irigasi Tahun Anggaran 2022, sebesar Rp.45.102.000,- atau 99,7% dari anggaran sebesar Rp.45.227.381,-

d) Belanja Modal Aset Tetap Lainnya

Pada tahun anggaran 2022, DPRKPLH tidak mempunyai alokasi anggaran untuk Belanja Modal Aset Tetap Lainnya.

3.1.3. Beban

Beban yang dimaksud dalam Laporan Operasional adalah Beban yang telah diterbitkan dokumen pembayarannya dan telah disahkan oleh Pengguna Anggaran, dan barang telah diterima. Beban per-31 Desember 2022 adalah sebesar Rp.33.315.731.962,-.

Kode Rekening	Nama Rekening	Jumlah
7	PENDAPATAN DAERAH- LO	1.081.363.850
71	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)-LO	1.081.363.850
7102	Retribusi Daerah-LO	1.081.363.850
710201	Retribusi Jasa Umum-LO	1.081.363.850
	Jumlah Pendapatan	1.081.363.850
8	BEBAN DAERAH	33.315.731.962
81	BEBAN OPERASI	33.315.731.962
8101	Beban Pegawai	12.414.312.849
810101	Beban Gaji dan Tunjangan ASN	7.679.085.475
810102	Beban Tambahan Penghasilan ASN	4.704.827.374
810103	Beban Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	30.400.000
8102	Beban Barang dan Jasa	15.943.114.375
810201	Beban Barang	3.344.264.093
810202	Beban Jasa	5.279.603.819
810203	Beban Pemeliharaan	227.377.611
810204	Beban Perjalanan Dinas	320.466.902
810205	Beban Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	6.771.401.950
8106	Beban Bantuan Sosial	465.000.000
810602	Beban Bantuan Sosial Uang kepada Keluarga	465.000.000
8108	Beban Penyusutan dan Amortisasi	4.490.664.736
810801	Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin	1.645.681.365

810802	Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan	2.157.604.202
810803	Beban Penyusutan Jalan, Jaringan dan Irigasi	675.017.920
810806	Beban Amortisasi Aset Lainnya- Aset Tidak Berwujud	12.361.250
83	DEFISIT NON OPERASIONAL- LO	2.640.000
8301	Defisit Penjualan/ Pertukaran/ Pelepasan Aset Non Lancar- LO	2.640.000
830104	Defisit Penghapusan BMD yang Tidak Dipisahkan- LO	2.640.000
	Jumlah Beban	33.315.731.962
	Surplus Defisit LO	(32.234.368.112)

3.1.4. Aset

3.1.4.1. Aset Lancar

Aset Lancar yang ada di Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup Kabupaten Temanggung per 31 Desember 2022 adalah sebesar Rp.85.407.136,- dimana Aset Lancar terdiri dari Kas di Bendahara Penerimaan maupun Bendahara Pengeluaran, Piutang (Piutang Retribusi dan Piutang Lainnya) dan Persediaan Habis Pakai. Aset Lancar per 31 Desember 2022 mengalami penurunan sebesar Rp.26.824.660,- dibandingkan Aset Lancar per 31 Desember 2021. Perincian Aset Lancar tersaji sebagai berikut:

	TA 2021	TA 2022
Kas	Rp. 0,-	Rp. 0,-
Piutang	Rp. 0,-	Rp. 0,-
Persediaan Habis Pakai	Rp.112.231.796,-	Rp.85.407.136,-
Jumlah	Rp.112.231.796,-	Rp.85.407.136,-

3.1.4.1.1. Kas

	TA 2021	TA 2022
Kas di Bendahara Penerimaan	Rp. 0,-	Rp. 0,-
Kas di Bendahara Pengeluaran	Rp. 0,-	Rp. 0,-
Jumlah	Rp. 0,-	Rp. 0,-

Kas per 31 Desember 2022 sebesar Rp 0,- sama dibandingkan saldo per 31 Desember 2021 sebesar Rp 0,- dengan rincian sebagai berikut :

a. Kas di Bendahara Penerimaan

- Kas di Bendahara Penerimaan -SKPD

Kas di Bendahara Penerimaan merupakan saldo kas pada Bendahara Penerimaan SKPD (baik yang ada di rekening bank maupun tunai) yang berasal dari pendapatan retribusi persampahan/kebersihan yang sah yang belum disetorkan ke Rekening Kas Umum Daerah per 31 Desember 2022. Saldo Kas di Bendahara Penerimaan -SKPD per 31 Desember 2022 sebesar Rp 0,-.

- Kas di Bendahara Penerimaan -Jasa Giro yang Belum Disetor (Non SiLPA)

Kas di Bendahara Penerimaan merupakan pendapatan jasa giro yang sampai dengan 31 Desember 2022 belum disetor ke Rekening Kas Umum Daerah. Jasa Giro Bendahara Penerimaan, setiap akhir bulan otomatis dipindahbukukan ke Rekening Kas Umum Daerah (RKUD). Jadi saldo kas di Bendahara Penerimaan-Jasa Giro yang belum disetor per 31 Desember 2022 sebesar Rp 0,-.

b. Kas di Bendahara Pengeluaran

- Kas di Bendahara Pengeluaran -SKPD

Merupakan sisa kas di Bendahara Pengeluaran yang masih dipegang oleh Bendahara Pengeluaran dan belum disetor ke Rekening Kas Umum Daerah. Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup telah menyetorkan sisa kas/UYHD pada Rekening Kas Umum Daerah pada tanggal 30 Desember 2022, sebesar Rp.52.232.968,-. Jadi kas di Bendahara Pengeluaran per tanggal 31 Desember 2022, yaitu sebesar Rp. 0,-.

- Kas di Bendahara Pengeluaran -Jasa Giro yang Belum Disetor (Non SiLPA)

Kas di Bendahara Pengeluaran merupakan pendapatan jasa giro yang sampai dengan 31 Desember 2022 belum disetor ke

Rekening Kas Umum Daerah. Jasa Giro otomatis langsung dipindahbukukan ke Rekening Kas Umum Daerah di setiap akhir bulan. Jadi Saldo Kas di Bendahara Pengeluaran -Jasa Giro yang belum disetor per 31 Desember 2022 sebesar Rp 0,-.

3.1.4.1.2. Piutang

Tidak terdapat piutang di Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup, baik berupa piutang pajak, piutang retribusi maupun piutang lainnya. Untuk Piutang Retribusi pelayanan persampahan/ kebersihan dan piutang lainnya per tanggal 31 Desember 2022, adalah Rp.0,- .

	TA 2021	TA 2022
Piutang Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan	Rp. 0,-	Rp. 0,-
Piutang Lainnya	Rp. 0,-	Rp. 0,-
Jumlah	Rp. 0,-	Rp. 0,-

3.1.4.1.3. Persediaan

Menggambarkan jumlah persediaan barang yang mempunyai sifat habis pakai dan diperoleh dengan maksud untuk mendukung kegiatan operasional Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup Kab. Temanggung. Persediaan habis pakai berupa Perabot kantor/ Alat tulis kantor, bahan kimia dan bahan lainnya. Saldo Persediaan Bahan Habis Pakai per 31 Desember 2022 adalah sebagai berikut:

Persediaan :	TA 2021	TA 2022
- Perabot kantor/ alat tulis kantor	Rp. 842.645,-	Rp.3.059.700,-
-Bahan kimia / bahan lainnya	Rp.111.389.151,-	Rp.82.347.436,-
Jumlah Persediaan	Rp.112.231.796,-	Rp.85.407.136,-

3.1.4.2. Aset Tetap

Komposisi dan nilai saldo aset tetap per 31 Desember 2021 dan per 31 Desember 2022, tersaji sebagai berikut :

	Jenis Aset Tetap	Tahun Anggaran 2021	Realisasi Belanja Modal TA 2022	Mutasi Masuk	Mutasi Keluar/ Reklas	Nilai Aset Tetap TA 2022
A	Tanah	2.737.256.025	-	15.478.129.032	-	18.215.385.057
B	Peralatan dan Mesin	22.949.376.135	183.819.360	38.230.000	496.671.460	22.675.754.035
C	Gedung dan Bangunan	82.356.821.235	107.136.585	25.126.318.526	-	107.680.276.346
D	Jalan, Irigasi dan Jaringan	13.033.920.701	45.102.000	281.176.000	-	13.340.198.701
E	Aset Tetap Lainnya	1.083.155.700	-	-	-	1.083.155.700
F	Konstruksi dalam Pengerjaan	47.622.000	-	-	-	47.622.000
	JUMLAH	122.208.161.796	426.057.945	40.903.853.558	496.671.460	163.042.391.839

Saldo akhir Aset Tetap Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp.163.042.391.839,- yang disajikan di Neraca merupakan hasil penambahan asset dari realisasi Belanja Modal TA 2022 dan juga mutasi masuk asset dari Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Kab. Temanggung, hibah Rumah Susun Parakan dan Kertosari dari Kementerian PUPR, penghapusan dan reklas.

Saldo masing-masing kelompok Aset Tetap per 31 Desember 2022 dapat dijelaskan sebagai berikut :

a. Tanah

Nilai Tanah periode 31 Desember 2022 sebesar Rp.18.215.385.057,- dengan rincian sebagai berikut:

No	Uraian	TA 2021	TA 2022
1.	Tanah	Rp.2.737.256.025,-	Rp.18.215.385.057,-

Nilai tanah Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup pada tahun 2022 mengalami perubahan karena adanya penambahan aset berupa pengalihan status pengelolaan senilai Rp.15.478.129.032,-. Berikut ini daftar mutasi masuk aset tanah karena adanya pengalihan status pengelolaan:

No	Nama Barang	Alamat	Penggunaan	Asal-Usul	Luas (m ²)	Harga
1	Tanah untuk Bangunan Instalasi Pengelolaan Sampah	Ds Sanggrahan Kec. Kranggan	Pembangunan Tpa Sanggrahan	Bagian Pemerintahan Umum	8985	595.452.112
2	Tanah Lapangan Perimbunan Pembuangan Sampah	Ds Sanggrahan Kec. Kranggan	Tempat Pembuangan Akhir	Tanah Negara	2571 7	733.947.825
3	Tanah Lapangan Perimbunan Pembuangan Sampah	Ds Sanggrahan Kec. Kranggan	Tpa Sanggrahan	Es. Hak milik Adat C.1059 P.16 D.18	1055	49.332.055
4	Tanah untuk Jalan Khusus/ Komplek	Perum Bukit Sroyo Indah, Madureso	Fasilitas Umum/jalan Dan Taman,mustola, dan Fasilitas Ciga	PT. Ganendra Honesta Rukma	1479 0	1.523.370.000
5	Tanah untuk Jalan Khusus/ Komplek	Perum Green Park Residence, Kebonsari	Fasilitas Umum/jalan Dan Taman	PT. Semua Rekan Jaya	1414	282.800.000
6	Tanah untuk Jalan Khusus/ Komplek	Perum Kampoeng Beli, Marding	Tanah Pekarangan	PT. Balines Krizu Muha	434	201.376.000
7	Tanah untuk Jalan Khusus/ Komplek	Perum Kampoeng Beli, Marding	Fasilitas Umum/tanah Pekarangan	PT. Balines Krizu Muha	4782	2.218.848.000
8	Tanah untuk Jalan Khusus/ Komplek	Perum Griya Sakinah 1, Giyanti	Fasilitas Umum	PT. Semua Rekan Jaya	3548	1.083.570.000
9	Tanah untuk Jalan Khusus/ Komplek	Perum Griya Sakinah 2, Mungsang	Fasilitas Umum	PT. Semua Rekan Jaya	1297	369.545.000
10	Tanah untuk Jalan Khusus/ Komplek	Perum Permata Indah 2, Madureso	Fasilitas Umum Dan Jalan	PT. Intan Permata	3254	2.062.426.000
11	Tanah untuk Jalan Khusus/ Komplek	Perum Permata Indah 3, Kowangan	Fasilitas Umum/jalan Dan Taman	PT. Intan Permata	561	348.752.000
12	Tanah untuk Jalan Khusus/ Komplek	Perum Permata Indah 3, Kowangan	Fasilitas Umum/jalan Dan Taman	PT. Intan Permata	763	465.482.000
13	Tanah untuk Jalan Khusus/ Komplek	Perum Bumi Pingit Raya, Pingit	Fasilitas Umum	PT. Arugerah Putra Jaya	1438	239.760.000
14	Tanah untuk Jalan Khusus/ Komplek	Perum Bumi Pingit Raya 2, Pingit	Jalan Dan Fasilitas Umum	PT. Arugerah Putra Jaya	2873	453.920.000
15	Tanah untuk Jalan Khusus/ Komplek	Perum Puri Amarta, Giyanti	Fasilitas Umum	PT. Arugerah Putra Jaya	986	342.028.000
16	Tanah untuk Jalan Khusus/ Komplek	Perum The Alston Springs, Sanggrahan	Tanah Pekarangan	PT. Mitra Bersama Realty	607	87.120.000

17	Tanah untuk Jalan Khusus/ Komplek	Perum The Aston Springs, Sanggrahan	Fasilitas Umum	PT. Mbra Bersama Realty	9591	1.534.560.000
18	Tanah untuk Jalan Khusus/ Komplek	Perum Graha Mas Real Estate, Campursari Batu	Fasilitas Umum	PT. Tiga Mas Solaris	4312	1.444.820.000
19	Tanah untuk Jalan Khusus/ Komplek	Perum Sindoro Peemal, Manggong	Fasilitas Umum	PT. Anugerah Karya Usaha Sejahtera	1638	136.680.000
20	Tanah untuk Jalan Khusus/ Komplek	Perum Graha Mahaa, Tlogorejo	Fasilitas Umum	PT. Serikah Wira Kusuma	1597	455.145.000
21	Tanah untuk Jalan Khusus/ Komplek	Perum The Hutama Resort, Medai	Fasilitas Umum	PT. Samudra Hartama Realty	683	108.800.000
22	Tanah untuk Jalan Khusus/ Komplek	Sindoro Residence 2, Kelurahan Kebonsari Kecamatan Temanggung	Fasilitas Umum	PT Anugerah Karya Usaha Sejahtera	1133	379.555.000
23	Tanah untuk Jalan Khusus/ Komplek	Griya Kertosari Aan, Kel. Kertosari Kcc. Temanggung	Fasilitas Umum	PT. Barika Abadi Jaya	985	457.040.000
Jumlah Mutasi Masuk Aset Tanah						15.478.129.032

b. Peralatan dan Mesin

No	Uraian	TA 2021	TA 2022
1.	Peralatan dan Mesin	Rp.22.949.376.135,-	Rp.22.675.754.035,-

Nilai peralatan dan mesin tahun 2022 mengalami perubahan dikarenakan adanya penambahan aset berupa Belanja Modal 2022 sebesar Rp.183.819.360,- , mutasi masuk senilai Rp.38.230.000,-, penghapusan Rp.257.979.000,- reklas ke ekstrakomptabel Rp.234.625.050,- dan reklas ke persediaan senilai Rp.3.067.410,-. Berikut ini perincian penambahan aset dari realisasi Belanja Modal Tahun Anggaran 2022, mutasi masuk, penghapusan dan reklas:

Realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin TA 2022 Sekretariat:

Kegiatan/ Sub. Kegiatan	Anggaran Perubahan 2022	Realisasi
Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		
Sub. Kegiatan Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya		

BELANJA MODAL	18.257.500	18.201.500
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	18.257.500	18.201.500
Belanja Modal Alat Penyimpanan Perlengkapan Kantor	4.447.000	4.440.000
- Almari Kaca Aluminium 120x45x170 cm		4.440.000
Belanja Modal Alat Dapur	840.500	830.000
- Kompor Gas Rinnai, tabung gas 3 kg, regulator gas		830.000
Belanja Modal Peralatan Studio Audio	12.970.000	12.931.500
- Wireless Sennheiser, Mic, @ 2 unit, @ 700.000,-		1.400.000
- Speaker Pasif Apollo 10' dan 2 speaker		1.850.000
- Speaker Aktif Verse		2.150.000
- Amplifier Crimson		2.500.000
- Amplifier TOA		2.250.000
- Horn Speaker/ TOA Kupingan seri 2H5050 2 unit		1.500.000
FPN		1.281.500

Realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin TA 2022 UPT, Laboratorium:

Kegiatan/ Sub. Kegiatan	Anggaran Perubahan 2022	Realisasi
Kegiatan Pencegahan Pencemaran dan/ atau Kerusakan LH Kab/ Kota		
Sub. Kegiatan Pengelolaan Laboratorium LH Kab/Kota		
BELANJA MODAL	7.550.000	7.521.360
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	7.550.000	7.521.360
Belanja Modal Alat Laboratorium Hematologi	90.000	89.910
- Pipet tetes kaca panjang 20 cm, 9 biji @ 9.990		89.910
Belanja Modal Alat Laboratorium Kualitas Air dan Tanah	7.460.000	7.431.450
- Corong porcelain RRT diameter 80 mm, 2 biji @ 222.000,-		444.000
- Elektroda pH meter Ohaus		6.987.450

Realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin TA 2022 Bidang Pengendalian, Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup :

Kegiatan/ Sub. Kegiatan	Anggaran Perubahan 2022	Realisasi
Kegiatan Pemulihan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten /Kota		
Sub. Kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Rehabilitasi		
BELANJA MODAL	101.654.500	99.678.500
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	101.654.500	99.678.500
Belanja Modal Alat Pengolahan Tanah dan Tanaman	2.977.500	2.977.500
- Cangkul besi gagang kayu 15 buah @ 198.500,-		2.977.500
Belanja Modal Alat Pemeliharaan Tanaman/ Ikan/ Ternak	3.000.000	3.000.000
- Hand Sprayer Elektrik dragon force 2 buah @ 1.500.000,-		3.000.000
Belanja Modal Alat Kantor Lainnya	8.900.000	8.900.000
- LCD Projector Epson eb-x06		8.900.000
Belanja Modal Alat Rumah Tangga Lainnya	11.500.000	10.680.000
- Camera Canon EOS M6		9.000.000
- Water Tom Lobster		1.680.000
Belanja Modal Peralatan Studio Pemetaan/ Peralatan Ukur Tanah	29.250.000	28.875.000
- Drone Dji Mavic, MMC Sandisk, Smartphone Redmi Note 9		28.875.000
Belanja Modal Alat Komunikasi Telephone	9.408.000	9.402.000
- Handy Talky Yaesu FT 4X, 5 unit. @ 1.567.000		7.835.000
- Handy Talky Yaesu FT 4X		1.567.000
Belanja Modal Sumber Tenaga	2.544.000	2.544.000
- Genset STRETFOR7 SF 2800		2.544.000
Belanja Modal Personal Computer	23.000.000	23.000.000
- PC Rakitan Xiaomi LED 27"		23.000.000
Belanja Modal Peralatan Personal Computer	5.500.000	5.500.000
- Printer Canon IX 677D		5.500.000
Belanja Modal Alat Pendukung Pencalran	5.575.000	4.800.000
- Tenda Lipat 3x3 m		4.800.000

Realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin TA. 2022 Bidang Tata Lingkungan:

KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	Anggaran Perubahan 2022	Realisasi
Kegiatan Pengelolaan Keaneekaragaman Hayati Kabupaten/ Kota		
Sub. Kegiatan Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)		
BELANJA MODAL	10.522.400	10.418.000
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	10.522.400	10.418.000
Belanja Modal Perkakas Bengkel Kayu	5.750.000	5.700.000
- Mesin Pemotong Kayu/ Chainsaw STIHL MS 250		5.700.000
Belanja Modal Alat Pengolahan Tanah dan Tanaman	4.459.400	4.418.000
- Benda 10 buah @ 49.000		490.000
- Cangkul 6 buah @ 195.000		1.170.000
- Gunting Taman Besar 20 buah @ 115.000		2.300.000
- Linggis Besar 2 buah @ 131.000		262.000
- Sabit 4 buah @ 49.000		196.000
Belanja Modal Alat Pemeliharaan Tanaman/ Ikan/Ternak	313.000	300.000
- Batu Asah 10 buah @ 30.000		300.000

Realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin TA. 2022 Bidang Kebersihan dan Pengelolaan Persampahan:

Kegiatan/ Sub. Kegiatan	Anggaran Perubahan 2022	Realisasi
Kegiatan Pengelolaan Sampah		
Sub. Kegiatan Penanganan Sampah dengan Melakukan Pemilahan, Pengumpulan, Pengangkutan, Pengolahan dan Pemrosesan Akhir Sampah di TPA/TPST/SPA Kabupaten/ Kota		
BELANJA MODAL	24.000.000	24.000.000
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	24.000.000	24.000.000

- Belanja Modal Personal Computer Acer 2 unit @ 12.000.000		24.000.000
Sub. Kegiatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengelolaan Persampahan		
BELANJA MODAL	24.000.000	24.000.000
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	24.000.000	24.000.000
- Belanja Modal Personal Computer Acer 1 unit	12.000.000	12.000.000
- Belanja Modal Alat Rumah Tangga Lainnya, TV LED 65" SHARP	12.000.000	12.000.000

Mutasi masuk peralatan dan mesin sebagai berikut:

No	Uraian	SKPD Asal	Nilai Aset
1	Toyota Kijang SPR H/ KF 40, AA 9507 JE, tahun 1992	RSUD	Rp.17.000.000,-
2	Mitsubishi L300 AA 1051 XE, tahun 1988	RSUD	Rp.17.000.000,-
3	Scanner merk Plustek type Smartoffice PS 283	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	Rp.4.230.000,-
	Jumlah		Rp.38.230.000,-

Penghapusan Peralatan dan Mesin sebagai berikut:

No	Uraian	Jumlah	Nilai Penghapusan	No SK Penghapusan
1	Termometer Standar, Alla France / 504A110, Tahun 2019	1	880.000	028.1/2476 TAHUN 2022
2	Termometer Standar, Alla France / 504A110, Tahun 2019	1	880.000	028.1/2476 TAHUN 2022
3	Termometer Standar, Alla France / 504A110, Tahun 2019	1	880.000	028.1/2476 TAHUN 2022
4	Termometer Standar, Alla France / 504A110, Tahun 2019	1	880.000	028.1/2476 TAHUN 2022
5	Termometer Standar, Alla France / 504A110, Tahun 2019	1	880.000	028.1/2476 TAHUN 2022
6	Termometer Standar, Alla France / 504A110, Tahun 2019	1	880.000	028.1/2476 TAHUN 2022
7	Truck + Attachment, Toyota /Dyna Long / AA 9537 JE, Tahun 1995	1	30.000.000	028.1/002439 TAHUN 2022
8	Truck + Attachment, ISUZU/NKR 58 / AA 9540 JE, Tahun 1997	1	222.699.000	028.1/002439 TAHUN 2022
	Jumlah Nilai Penghapusan		257.979.000	

Jumlah Total Realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin selama Tahun Anggaran 2022 adalah sebesar Rp.183.819.360,-. Dari realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin tersebut, terdapat barang *extrakomptabel* yang harus di *reklas* keluar dari Kartu Inventaris Barang Peralatan dan Mesin (KIB B). **Barang extrakomptabel** adalah Barang Milik Pemerintah Daerah yang berupa aset tetap yang memenuhi unsur kapitalisasi tetapi nilai perolehannya berada di bawah nilai kapitalisasi yaitu Rp.500.000,-. Reklasifikasi adalah perpindahan suatu akun dari suatu pos ke pos yang lain dalam bagan akun standar. **Reklasifikasi asset** adalah pemindahan kelompok aset tetap ke aset lainnya. Barang/asset yang bernilai di bawah Rp.500.000,- dalam realisasi belanja modal TA 2022 yang harus direklas ke barang ekstrakomptabel senilai Rp.5.357.000,- dan kemudian reklas Aset Peralatan dan Mesin ke Extrakomptabel dengan nilai dibawah Rp.500.000,- adalah senilai Rp.229.268.050,-. Jadi nilai total reklas ke Extrakomptabel adalah Rp.234.625.050,-

Sedangkan reklas Peralatan dan Mesin ke Barang Persediaan adalah sebagai berikut:

No	Urutan	Nilai
1	Cangkul 15 @ 198.500	Rp.2.977.500,-
2	Pipet Tetes Panjang 20 Cm (Lab Hematologi)	Rp.89.910,-
	Jumlah reklas ke Barang Persediaan	Rp.3.067.410,-

Kemudian total jumlah Peralatan dan Mesin per 31 Desember 2022 adalah:

Peralatan dan Mesin TA 2021	Rp.22.949.376.135,-
Mutasi Masuk	Rp.38.230.000,-
Realisasi Belanja Modal 2022	Rp.183.819.360,-
Penghapusan	Rp.257.979.000,-
Mutasi Keluar/Reklas ke barang ekstrakomptabel	Rp.234.625.050,-
Reklas ke Barang Persediaan	Rp.3.067.410,-
JUMLAH NILAI PERALATAN DAN MESIN TA 2022	Rp. 22.675.754.035,-

c. Gedung dan Bangunan

No	Uraian	TA 2021	TA 2022
1.	Gedung dan Bangunan	Rp.82.356.821.235,-	Rp.107.680.276.346,-

Nilai Gedung dan Bangunan TA 2022 sebelum penyusutan mengalami perubahan sebesar Rp.107.680.276.346,- dikarenakan ada penambahan belanja modal Pendopo Relawan Konservasi senilai Rp.197.136.585,- dan mutasi masuk Flat Rusun Permanent Parakan dan Kertosari hibah dari Kementerian PU sebesar Rp.25.126.318.526,- .

Kegiatan/ Sub. Kegiatan	Anggaran Perubahan 2022	Realisasi
Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		
Sub. Kegiatan Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya		
BELANJA MODAL	197.993.900	197.136.585
Belanja Modal Gedung dan Bangunan	197.993.900	197.136.585
- Belanja Modal Bangunan Gedung Kantor (Pendopo Relawan Konservasi)		197.136.585

d. Jalan, Irigasi dan Jaringan

No	Uraian	TA 2021	TA 2022
1.	Jalan, Irigasi dan Jaringan	13.033.920.701	13.340.198.701

Nilai jalan, irigasi dan Jaringan mengalami perubahan karena ada Belanja Modal Tempat Parkir Armada Sampah sebesar Rp.45.102.000,- dan mutasi masuk karena ada pengalihan status pengelola senilai Rp.261.176.000,-

Berikut ini penambahan dari Belanja Modal Tahun 2022 sebagai berikut:

Kegiatan/ Sub. Kegiatan	Anggaran Perubahan 2022	Realisasi
Kegiatan Pengelolaan Sampah		
Sub. Kegiatan Penanganan Sampah dengan Melakukan Pemilahan, Pengumpulan, Pengangkutan, Pengolahan dan Pemrosesan Akhir Sampah di TPA/TPST/SPA Kabupaten/ Kota		
BELANJA MODAL	69.227.381	69.102.000

Belanja Modal Jalan, Jaringan dan Irigasi	45.227.381	45.102.000
- Belanja Modal Jalan Kabupaten (Tempat Parkir Armada Sampah)		45.102.000

Mutasi masuk karena pengalihan status pengelola sebagai berikut:

No	Nama Barang	Letak/ Lokasi	Asal- Usul	Harga
1	Jalan Khusus Kompleks	Perum Griya Kertosari Asri Kel. Kertosari Temanggung	Hibah dari PT. Barka Abadi Jaya	58.910.000
2	Jalan Khusus Kompleks	Perum Sindoro Residence 2 Kel. Kebonsari Temanggung	Hibah dari PT. Anugerah Karya Usaha Sejahtera	165.360.000
3	Saluran Drainase	Perum Griya Kertosari Asri Kel. Kertosari Temanggung	Hibah dari PT. Barka Abadi Jaya	8.976.000
4	Saluran Drainase	Perum Sindoro Residence 2 Kel. Kebonsari Temanggung	Hibah dari PT. Anugerah Karya Usaha Sejahtera	27.930.000
Jumlah mutasi masuk				281.176.000

e. Aset Tetap Lainnya

No	Uraian	TA 2021	TA 2022
1.	Aset Tetap Lainnya	1.083.155.700	1.083.155.700

Nilai Aset tetap lainnya pada tahun 2022 tidak mengalami perubahan.

f. Konstruksi dalam Pengerjaan

Konstruksi dalam Pengerjaan di Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup Kabupaten Temanggung per 31 Desember 2022 ini tidak mengalami perubahan atau sama dengan tahun 2021, yaitu sebesar Rp. 47.622.000,- yang berupa Penyusunan DED perluasan TPA Sanggrahan Kranggan.

No	Uraian	TA 2021	TA 2022
1.	Konstruksi dalam pengerjaan	47.622.000	47.622.000

Jadi nilai total Aset Tetap Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup tahun 2022 adalah sebesar Rp.163.042.391.839,-

No	Uraian	TA 2021	TA 2022
1.	Aset Tetap	122.208.151.796	163.042.391.839

3.1.4.3. Aset Lainnya

Nilai Aset lainnya pada tahun 2022 mengalami perubahan yaitu sebesar Rp.1.251.402.200,- , dimana terdiri dari Aset tidak berwujud senilai Rp.49.445.000,- dan Asei Lain-lain senilai Rp.1.201.957.200,- karena ada penghapusan Software Sistem Informasi (Website DLH, Jaringan Internet) senilai Rp.16.940.000,-.

No	Uraian	TA 2021	TA 2022
1.	Aset Lainnya	1.268.342.200	1.251.402.200
	Aset Lain-lain	1.218.897.200	1.201.957.200
	Aset Tidak Berwujud	49.445.000	49.445.000

Jadi total jumlah Aset Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup (DPRKPLH) tahun 2022 adalah sebesar Rp.120.586.233.968,-

No	Uraian	TA 2021	TA 2022
1.	Aset Lancar	112.231.796	85.407.136
2.	Aset Tetap	122.208.151.796	163.042.391.839
	Akumulasi Penyusutan (KIB B, C dan D)	35.154.263.784	42.572.468.132
3.	Aset Lainnya	1.268.342.200	1.251.402.200
	Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya	1.218.897.200	1.201.957.200
	Akumulasi Amortisasi Aset Tidak Berwujud	6.180.625	18.541.875
	Jumlah Total Aset	87.209.384.183	120.586.233.968

(Merupakan penjumlahan dari Aset Lancar, Aset Tetap dan Aset Lainnya)

3.1.5. Kewajiban

3.1.5.1. Kewajiban Jangka Pendek

Didalam Neraca s/d 31 Desember 2022 jumlah kewajiban Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup Kabupaten Temanggung yang merupakan kewajiban jangka pendek yaitu hutang belanja, yang dipergunakan untuk membiayai kegiatan-kegiatan di lingkungan Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup Kabupaten Temanggung, yang dibayarkan pada bulan Januari 2023. Hutang belanja di Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup ada 2 jenis yaitu hutang belanja pegawai dan hutang belanja barang dan jasa.

Perincian hutang belanja pegawai:

No.	URAIAN	JUMLAH
1.	Pembayaran Tambahan Penghasilan Pegawai Bulan Desember 2022,	346.507.319
	Keg. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah,	
	Sub. Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	
	- Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS Rp. 346.507.319,-	
	JUMLAH	346.507.319

Perincian hutang belanja barang dan jasa:

No	URAIAN	JUMLAH
1.	Pembayaran Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap Bulan DESEMBER 2022;	2.080.000
	Keg. Peningkt. Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 Ha	
	Sub. Keg. Kerjasama Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni Beserta PSU	
	- Belanja Jasa Tenaga Administrasi Rp. 2.000.000,-	
	- Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN (BPJS Kesehatan) Rp. 80.000,-	

2.	Membayar Honorarium Belanja Jasa Tenaga Kebersihan (tenaga operasional Kebun Ngipik Pringsurat) Bulan Desember 2022;	5.476.539
	Kegiatan Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kabupaten/Kota,	
	Sub. Keg. Pengelolaan Taman Keanekaragaman Hayati di Luar Kawasan Hutan	
	- Belanja Jasa Tenaga Kebersihan Rp. 5.250.000,-	
	- Belanja iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN (BPJS Kesehatan) Rp. 226.539,-	
3.	Pembayaran Honorarium Pegawai Honorrer/Tidak Tetap Bulan DESEMBER 2022;	69.369.494
	Kegiatan Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kabupaten/Kota,	
	Sub. Keg. Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH):	
	- Belanja Jasa Tenaga Kebersihan Rp. 66.500.000,-	
	- Belanja iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN (BPJS Kesehatan) Rp. 2.869.494,-	
4.	Pembayaran Honorarium Jasa Tenaga Pendukung Administrasi dan Tenaga Keamanan IPT Rusunawa DPRKPLH Bulan DESEMBER 2022	15.976.539
	Kegiatan Pembinaan Pengelolaan Rumah Susun Umum dan/atau Rumah Khusus	
	Sub. Keg. Penatausahaan Pemanfaatan Rumah Susun Umum dan/atau Rumah Khusus	
	- Belanja Jasa Tenaga Administrasi Rp. 11.850.000,-	
	- Belanja Jasa Tenaga Keamanan Rp. 3.500.000,-	
	- Belanja iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN (BPJS Kesehatan) Rp. 626.539,-	
5.	Pembayaran Honorarium Pegawai Honorrer/Tidak Tetap, 4 orang, Bulan DESEMBER 2022;	8.216.000
	Keg. Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan LH Kab/Kota,	
	Sub. Keg. Pengelolaan Laboratorium Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota,	
	- Belanja Jasa Tenaga Administrasi Rp. 7.900.000,-	
	- Belanja iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN (BPJS Kesehatan) Rp. 316.000,-	
6.	Pembayaran Honorarium Pegawai Honorrer/Tidak Tetap, 1 orang, Bulan DESEMBER 2022;	2.080.000

	Keg. Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan dan Izin PPLH diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kab/Kota	
	Sub. Keg. Pengawasan Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin LH, Izin PPLH yang Diterbitkan oleh Pemda Kab/Kota	
	- Belanja Jasa Tenaga Administrasi Rp. 2.000.000,-	
	- Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN (BPJS Kesehatan) Rp. 80.000,-	
7.	Pembayaran Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap 2 orang, Bulan DESEMBER 2022;	3.675.513
	Keg. Pemulihan Pencemaran dan/atau Kerusakan LH Kab/ Kota	
	Sub. Keg. Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Rehabilitasi	
	- Belanja Jasa Tenaga Administrasi Rp. 3.600.000,-	
	- Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN (BPJS Kesehatan) Rp. 75.513,-	
8.	Membayar Honorarium Jasa Tenaga Administrasi Persampahan Bulan DESEMBER 2022	13.433.565
	Keg. Pengelolaan Sampah,	
	Sub. Keg. Penanganan Sampah dengan melakukan Pemilahan, Pengumpulan, Pengangkutan, Pengolahan, dan Pemrosesan Akhir Sampah di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota:	
	- Belanja Jasa Tenaga Administrasi Rp. 12.900.000,-	
	- Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN (BPJS Kesehatan) Rp. 533.565,-	
9.	Membayar Honorarium Jasa Tenaga Kebersihan Persampahan DPRKPLH Bulan DESEMBER 2022	201.030.780
	Keg. Pengelolaan Sampah,	
	Sub. Keg. Penanganan Sampah dengan melakukan Pemilahan, Pengumpulan, Pengangkutan, Pengolahan, dan Pemrosesan Akhir Sampah di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota:	
	- Belanja Jasa Tenaga Kebersihan Rp. 190.500.000,-	
	- Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN (BPJS Kesehatan) Rp. 4.530.780,-	
10.	Pembayaran Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap Bulan DESEMBER 2022:	36.457.669
	Keg. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah,	
	Sub. Keg. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	

	Belanja Jasa Tenaga Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Rp. 10.800.000,-	
	Belanja Jasa Tenaga Administrasi Rp. 13.700.000,-	
	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan Rp. 8.750.000,-	
	Belanja Jasa Tenaga Scpir Rp. 1.750.000,-	
	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN (BPJS Kesehatan) Rp. 1.457.669,-	
11.	Pembayaran Belanja Telepon, Listrik dan Air DPRKPLH, untuk Bulan Januari, Pemakaian Bulan Desember 2022;	7.520.592
	Kegiatan Penyediaan Jasa Perunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
	Sub. Keg. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	
	- Telepon Rp.1.071.400,-	
	- Air Rp.209.100,-	
	- Listrik Rp 6.240.092,-	
	JUMLAH	365.316.691

Jadi Total Kewajiban jangka pendek adalah Rp.711.824.010,-

3.1.5.2. Kewajiban Jangka Panjang

Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup tidak terdapat kewajiban jangka panjang.

Jadi Jumlah Total Kewajiban adalah Rp.711.824.010,- (Kewajiban jangka pendek dan kewajiban jangka panjang).

No	Kewajiban	TA 2021	TA 2022
1.	Hutang Belanja Pegawai	404.284.000	346.507.319
2.	Hutang Belanja Barang dan Jasa	351.783.703	365.316.691
	Jumlah	756.067.703	711.824.010

3.1.6. Ekuitas Dana

Ekuitas DPRKPLH adalah kekayaan bersih DPRKPLH, yang merupakan selisih antara jumlah aset dan jumlah kewajiban DPRKPLH.

Perubahan ekuitas nilai aset Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup Kab. Temanggung per 31 Desember 2022 adalah sebagai berikut:

No	KETERANGAN	JUMLAH
1	Ekuitas Awal	86.463.881.679,89
2	Surplus / (Defisit) LO	(32.234.368.112,06)
3	Koreksi Kesalahan, Perubahan Kebijakan Akuntansi	37.473.988.647,94
4	Ekuitas untuk dikonsolidasikan	28.181.703.841,00
5	Ekuitas Akhir	119.885.206.056,77

Kemudian untuk saldo ekuitas per-31 Desember 2021 dan 31 Desember 2022 sebagai berikut:

	31 Desember 2021	31 Desember 2022
EKUITAS	86.463.881.679,89	119.885.206.056,77

3.2. Pengungkapan atas Pos-Pos yang Timbul sehubungan dengan Penerapan Basis Akruai atas Pendapatan, Belanja dan Rekonsiliasinya dengan Penerapan Basis Kas, untuk Entitas Akuntansi/Entitas Pelaporan yang Menggunakan Basis Akruai pada SKPD

Pada CaLK per 31 Desember 2022 terdapat laporan komparasi anggaran, akuntansi dan penatausahaan periode 1 Januari 2022 s/d 31 Desember 2022.

Uraian	Anggaran	Realisasi		Selisih Akuntansi-Penatausahaan
		Akuntansi	Penatausahaan	
PUNGUT				
Utang PPh 21		3.691.455,58	3.691.455,58	0,00
Utang PPh 22		19.499.813,10	19.499.813,10	0,00
Utang PPh 23		10.036.162,14	10.036.162,14	0,00
Utang PPh Pasal 4 (2)		4.364.660,00	4.364.660,00	0,00

Utang PPN Pusat		163.038.536,59	163.038.536,59	0,00
Utang Pajak Daerah Katering		6.931.816,22	6.931.816,22	0,00
SETOR				
Utang PPh 21		3.691.455,58	3.691.455,58	0,00
Utang PPh 22		19.499.813,10	19.499.813,10	0,00
Utang PPh 23		10.036.162,14	10.036.162,14	0,00
Utang PPh Pasal 4 (2)		4.364.660,00	4.364.660,00	0,00
Utang PPN Pusat		163.038.536,59	163.038.536,59	0,00
Utang Pajak Daerah Katering		6.931.816,22	6.931.816,22	0,00
BELANJA DAERAH	30.185.522.234	29.263.067.691	29.263.067.691	0,00

BAB IV

PENJELASAN ATAS INFORMASI-INFORMASI NON KEUANGAN SKPD

1. Gambaran Umum

Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup (DPRKPLH) Kabupaten Temanggung, dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 24 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Temanggung, dan Peraturan Bupati Temanggung Nomor 56 Tahun 2020 tentang Kedudukan Susunan dan Tatakerja Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Temanggung. DPRKPLH ini menyelenggarakan urusan Pemerintahan bidang Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, dan Bidang Pertanahan dan bidang Lingkungan Hidup.

Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup Kabupaten Temanggung beralamat di Jl. Gerilya No. 20 Maron, Sidorejo (Laboratorium Tembakau), Kode Pos 58251, Telepon/ Faximili (0293) 4901569, Email: dprkplh.temanggungkab@gmail.com .

2. Tugas Pokok dan Fungsi

DPRKPLH mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan di bidang perumahan rakyat, kawasan permukiman, pertanahan, lingkungan hidup dan tugas pembantuan yang ditugaskan kepada daerah.

Dalam melaksanakan tugas, Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup mempunyai fungsi:

- a. Penyusunan kebijakan teknis di bidang perumahan rakyat, kawasan permukiman, pertanahan, lingkungan hidup, kebersihan, persampahan;
- b. Pelaksanaan tugas dukungan teknis bidang perumahan rakyat, kawasan permukiman, pertanahan, lingkungan hidup, kebersihan, persampahan;

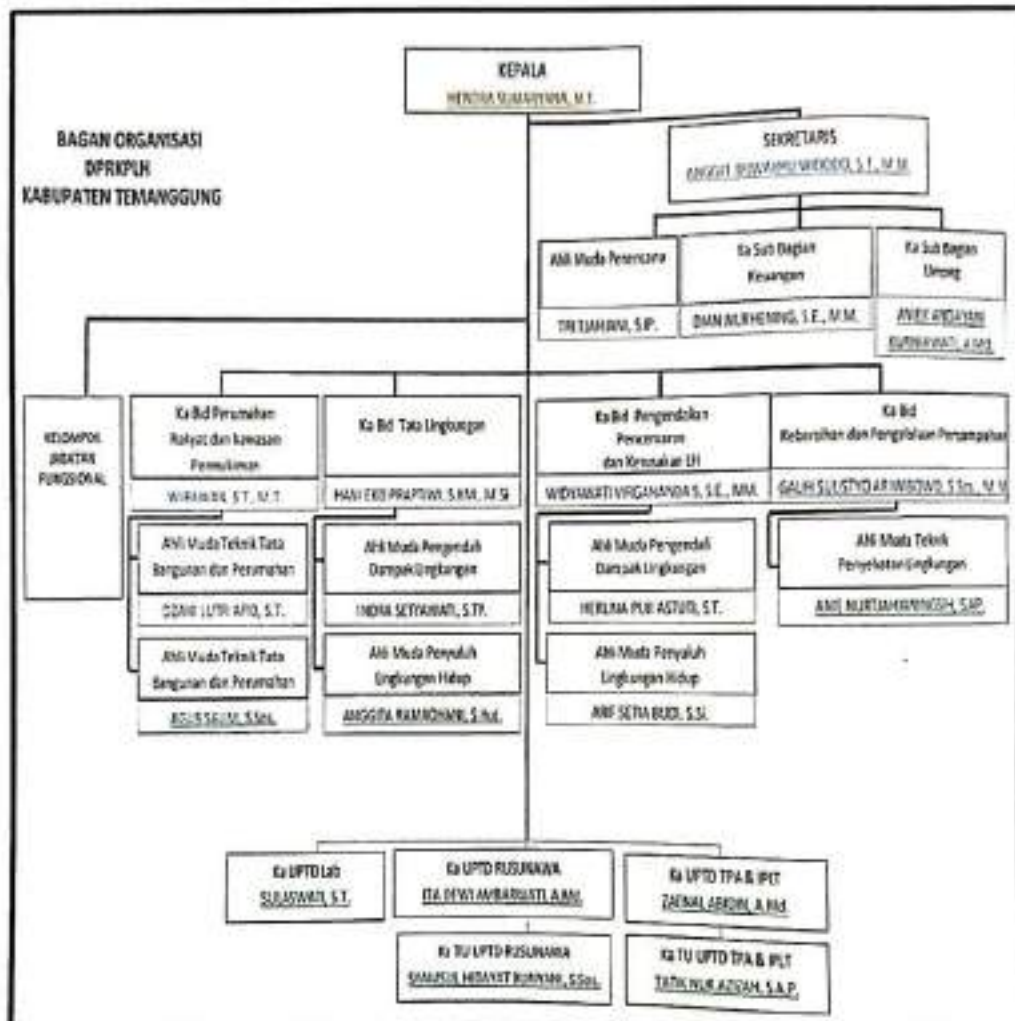
- c. Pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dukungan teknis di bidang perumahan rakyat, kawasan permukiman, pertanahan, lingkungan hidup, kebersihan, persampahan;
- d. Pembinaan teknis penyelenggaraan fungsi-fungsi urusan pemerintahan daerah di bidang perumahan rakyat, kawasan permukiman, pertanahan, lingkungan hidup, kebersihan, persampahan;
- e. Pengarahan, pembinaan dan pengkoordinasian pelaksanaan fungsi kesekretariatan dinas;
- f. Pembinaan terhadap UPTD dalam lingkup dinas;
- g. Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Bupati, sesuai dengan fungsinya.

3. Struktur Organisasi

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 24 Tahun 2020 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Temanggung, Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup Kab. Temanggung mempunyai struktur organisasi sebagai berikut:

- a. Kepala Dinas
- b. Sekretaris membawahi:
 - 1) Subbagian Perencanaan;
 - 2) Subbagian Keuangan;
 - 3) Subbagian Umum Kepegawaian.
- c. Bidang Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
- d. Bidang Tata Lingkungan
- e. Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup
- f. Bidang Kebersihan dan Pengelolaan Persampahan
- g. Kepala UPTD Rusunawa;
 - 1) Kepala Subbagian Tata Usaha
- h. Kepala UPTD Laboratorium Lingkungan;
- i. Kepala UPTD TPA- IPLT;
 - 1) Kepala Subbagian Tata Usaha
- j. Kelompok Jabatan Fungsional.

Gambar 4.1.
Struktur Organisasi DPRKPLH Kabupaten Temanggung



4. Visi dan Misi

Visi dan Misi DPRKPLH Kabupaten Temanggung mengacu pada Visi dan Misi Kepala Daerah. Visi Kabupaten Temanggung sebagaimana tertuang dalam RPJMD Tahun 2018-2023 adalah **“TERWUJUDNYA MASYARAKAT TEMANGGUNG YANG TENTREM, MAREM, GANDEM”**. Pada visi tersebut terdapat makna yang terkandung berdasarkan masing-masing frase yang terdiri atas tiga frase, yaitu kata **TENTREM, MAREM, dan GANDEM**. Visi tersebut mengandung filosofi dasar yaitu:

Tentrem : Terwujudnya kehidupan masyarakat yang aman, damai, rukun, penuh kegotongroyongan, hidup

berdampingan tanpa memandang perbedaan suku, agama, ras, golongan, dan status sosial, serta saling menghormati antar masyarakat.

Marem : Terpenuhinya kebutuhan dasar masyarakat secara lahir dan batin, adil dan merata.

Gandem : Masyarakat memiliki kemampuan berpikir, beraktualisasi, inovatif, dan kreatif, mandiri, serta berprestasi sehingga menjadi masyarakat yang hebat.

Upaya untuk mewujudkan Visi Kabupaten Temanggung Tahun 2018- 2023, dirumuskan dalam 3 (tiga) Misi Pembangunan Kabupaten Temanggung sebagai berikut:

- a. Mewujudkan sumber daya manusia yang berkualitas, berkarakter, dan berdaya;
- b. Mewujudkan pemberdayaan ekonomi kerakyatan yang berbasis potensi unggulan daerah dan berkelanjutan
- c. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan pelayanan publik yang berkualitas.

Berdasarkan Visi dan misi diatas maka DPRKPLH memenuhi misi ke 2 dan ke 3 dengan tujuan dan sasaran sebagai berikut:

- **Misi 2** : Mewujudkan Pemberdayaan Ekonomi Kerakyatan yang berbasis Potensi Unggulan Daerah yang Berkelanjutan.
Tujuan : Meningkatkan Kualitas Lingkungan Hidup
Sasaran : Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup
- **Misi 3** : Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan Pelayanan Publik yang Berkualitas.
Tujuan : Meningkatnya Tata Kelola Organisasi Perangkat Daerah
Sasaran : Meningkatnya Kualitas Pelayanan Perangkat Daerah, dan Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah

BAB V PENUTUP

Laporan Keuangan Tahun 2022 disajikan dengan berpedoman pada Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah. Teknis pelaksanaannya mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP), Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Peraturan Daerah Nomor 23 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, dan Peraturan Daerah Nomor 21 tahun 2017 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah, dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah.

Dalam penyusunan Laporan Keuangan, Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) merupakan bagian tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup (DPRKPLH) Kabupaten Temanggung untuk Tahun Anggaran 2022. Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) meliputi penjelasan atau daftar terinci atau analisis atas nilai suatu pos yang disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran (LRA), Neraca, Laporan Operasional (LO) dan Laporan Perubahan Ekuitas (LPE). Dari penjelasan pos-pos Laporan Keuangan Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup, dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Laporan Realisasi Anggaran (LRA)

a. Pendapatan

No	Uraian	Anggaran Perubahan TA 2022 (Rp)	Realisasi (Rp)	Sisa Anggaran (Rp)	%	Keterangan
1	2	3	4	5	6	7
1.	Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan	825.000.000	1.081.363.850	Rp.0,-	131%	Retribusi melampaui target yang ditetapkan yaitu sebesar Rp.256.363.850,-
	Jumlah Total	825.000.000	1.081.363.850	Rp.0,-	131%	

b. Realisasi Belanja

Tahun Anggaran 2022

	Anggaran Perubahan	Realisasi
Belanja Operasi	Rp.29.753.401.553,-	Rp.28.837.009.746,-
Belanja Modal	Rp.432.120.681,-	Rp.426.057.945,-
Jumlah	Rp.30.185.522.234,-	Rp.29.263.067.691,-

2. Neraca

No	Uraian	TA 2022
1.	Aset Lancar	85.407.136
2.	Aset Tetap	163.042.391.839
	Akumulasi Penyusutan (KIB B, C dan D)	42.572.468.132
3.	Aset Lainnya	1.251.402.200
	Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya	1.201.957.200
	Akumulasi Amortisasi Aset Tidak Berwujud	18.541.875
	Jumlah Total Aset	120.586.233.968

3. Laporan Operasional

Kode Rekening	Nama Rekening	Jumlah
7	PENDAPATAN DAERAH- LO	1.081.363.850
71	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)-LO	1.081.363.850
7102	Retribusi Daerah-LO	1.081.363.850
710201	Retribusi Jasa Umum-LO	1.081.363.850
	Jumlah Pendapatan	1.081.363.850
8	BEBAN DAERAH	33.315.731.962
81	BEBAN OPERASI	33.315.731.962
8101	Beban Pegawai	12.414.312.849
810101	Beban Gaji dan Tunjangan ASN	7.679.085.475
810102	Beban Tambahan Penghasilan ASN	4.704.827.374
810103	Beban Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	30.400.000
8102	Beban Barang dan Jasa	15.943.114.375
810201	Beban Barang	3.344.264.093
810202	Beban Jasa	5.279.603.819
810203	Beban Pemeliharaan	227.377.611
810204	Beban Perjalanan Dinas	320.466.902
810205	Beban Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	6.771.401.950
8106	Beban Bantuan Sosial	465.000.000
810602	Beban Bantuan Sosial Uang kepada Keluarga	465.000.000
8108	Beban Penyusutan dan Amortisasi	4.490.664.738
810801	Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin	1.645.681.365
810802	Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan	2.157.804.202
810803	Beban Penyusutan Jalan, Jaringan dan Irigasi	675.017.920
810806	Beban Amortisasi Aset Lainnya- Aset Tidak Berwujud	12.361.250
83	DEFISIT NON OPERASIONAL- LO	2.640.000
8301	Defisit Penjualan/ Pertukaran/ Pelepasan Aset Non Lancar- LO	2.640.000
830104	Defisit Penghapusan BMD yang Tidak Dipisahkan- LO	2.640.000

	Jumlah Beban	33.315.731.962
	Surplus Defisit LO	(32.234.368.112)

4. Laporan Perubahan Ekuitas (LPE)

No	KETERANGAN	JUMLAH
1	Ekuitas Awal	86.463.881.679,89
2	Surplus / (Defisit) LO	(32.234.368.112,06)
3	Koreksi Kesalahan, Perubahan Kebijakan Akuntansi	37.473.988.647,94
4	Ekuitas untuk dikonsolidasikan	28.181.703.841,00
5	Ekuitas Akhir	119.885.206.056,77

Kami berharap penyampaian Catatan atas Laporan Keuangan ini dapat berguna bagi pihak-pihak yang berkepentingan (*stakeholder*) serta memenuhi prinsip-prinsip transparansi, akuntabilitas, pertanggungjawaban, independensi, dan *fairness* dalam pengelolaan keuangan daerah.

Demikian Catatan atas Laporan Keuangan Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup Kabupaten Temanggung yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup Kabupaten Temanggung Tahun Anggaran 2022.

Temanggung, 2 Januari 2023

Pejabat Pengguna Anggaran/Barang

Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman
dan Lingkungan Hidup Kabupaten Temanggung



HENDRA SUMARYAMA, MT
NIP. 19720324 199203 1 003